

SKRIPSI

AKUNTANSI PERTANGGUNG JAWABAN PADA BIRO PENGELOLAAN ASET DAN BARANG PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN



**WAWAN SETIAWAN
1310321024**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2018**

SKRIPSI

AKUNTANSI PERTANGGUNG JAWABAN PADA BIRO PENGELOLAAN ASET DAN BARANG PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN



diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana pada Program Studi S1 Akuntansi

WAWAN SETIAWAN
1310321024

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2018

SKRIPSI

**AKUNTANSI PERTANGGUNG JAWABAN PADA BIRO
PENGELOLAAN ASET DAN BARANG PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

disusun dan diajukan oleh

**WAWAN SETIAWAN
1310321024**

telah diperiksa, disetujui dan diuji

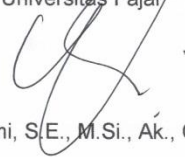
Makassar, 08 Agustus 2019

Pembimbing



Andi Dian Novita, S.ST., M.Si

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar



Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA

SKRIPSI

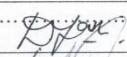


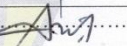
AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN PADA BIRO PENGELOLAAN ASET DAN BARANG PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

disusun dan diajukan oleh

WAWAN SETIAWAN
1310321128

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **08 Agustus 2019** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andi Dian Novita, S.ST., M.Si NIDN: 0909118801	Ketua	1... 
2.	Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA NIDN: 0925107801	Sekretaris	2... 
3.	Dinar, S.E., M.Si NIDN: 0916058001	Anggota	3... 
4.	Drs. Syamsuddin Bidol, M.Si NIDN: 0901016507	Eksternal	4... 

Dekan Fakultas Ekonomi
dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar


UNIVERSITAS FAJAR
DEKAN FAKULTAS
EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
Hj. Yusmanizar, S.Sos., M.IKom
NIDN: 0925096902

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar


UNIVERSITAS FAJAR
PRODI AKUNTANSI
Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN. 0925107801

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Wawan Setiawan
NIM : 1310321024
Program Studi : S1 Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **AKUNTANSI PERTANGGUNG JAWABAN PADA BIRO PENGELOLAAN ASET DAN BARANG PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya dalam naskah ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 08 Agustus 2019
Yang Membuat Pernyataan,


Wawan Setiawan

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Analisis Pengendalian Internal atas Sistem Penggajian pada Maxone Hotel & Resort Makassar". Salam dan shalawat juga peneliti ucapkan kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa sallam yang menginspirasi dalam segala hal, termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih peneliti ucapkan kepada semua pihak yang memberikan bantuan baik materil dan moril, maupun do'a. Berkat bantuannya segala kendala dapat peneliti atasi. Untuk itu dengan rasa hormat, peneliti ucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua, Ayah & Ibu yang senantiasa memberikan semua yang dimiliki dan curahan kasih dan sayang, doa dan dukungan untuk membuat peneliti berada dalam tingkatan seperti sekarang ini.
2. Saudara kandung terima kasih atas dukungan dan do'anya.
3. Bapak Dr. Mulyadi Hamid, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Fajar.
4. Ibu Hj. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar.
5. Ibu Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Prodi S1 Akuntansi Universitas Fajar.
6. Bapak, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA selaku Penasihat Akademik.
7. Ibu A. Dian Novita, S. ST., M. Si selaku Dosen Pembimbing dalam proposal skripsi ini. Beliau telah memberikan banyak arahan dan tambahan ilmu bagi peneliti selama menyusun proposal skripsi ini.

8. Seluruh dosen dan staf Universitas Fajar.
9. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Akuntansi S1 Universitas Fajar (HIMATA UNIFA), terima kasih atas segala dukungan dan saran-sarannya.

Akhir kata peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, arahan, dan saran-saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 08 Agustus 2019

Hormat Peneliti

Wawan Setiawan

ABSTRAK

Akuntansi Pertanggungjawaban Pada Biro Pengelolaan Aset Dan Barang Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

**Wawan Setiawan
Andi Dian Novita**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pelaksanaan akuntansi pertanggung jawaban pada Biro Pengelolaan Aset dan Barang Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini merupakan proses yang dilakukan secara bertahap, yakni dari perencanaan dan perancangan penelitian, menentukan fokus penelitian, pengumpulan data, analisis, dan penyajian hasil penelitian. Penulisan hasil penelitian ini dilakukan secara deskriptif atau melalui uraian-uraian yang menggambarkan dan menjelaskan subjek penelitian. Pendekatan dalam ini mengikuti langkah-langkah kerja penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan pengumpulan data melalui penelitian lapangan, wawancara, dan tinjauan pustaka. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Laporan pertanggungjawaban Biro Pengelolaan Aset dan Barang Pemerintah Sulawesi Selatan juga menyimpulkan terkait pendapatan yang termasuk biaya tidak terkendali terdapat selisih anggaran lebih besar dari realisasinya, serta pendapatan lainnya yang tidak dianggarkan namun dapat terealisasikan.

Kata kunci : Akuntansi pertanggungjawaban

ABSTRACT

Accounting In The Management Of Its Assets And The Accountability Bureau Government Goods South Sulawesi Province

**Wawan Setiawan
Andi Dian Novita**

This report aims to review the application of the accounting questioned on the bureau asset management and if the government of south sulawesi .The research is the one conducted gradually , from planning and design research , determines the focus research , data collection , analysis , and the presentation of the research .The findings this is a descriptive or through uraian-uraian describing and explain the subject of study .This approach in this follows work langkah-langkah qualitative study .Researchers used data collection through field research , interview , and literature review .The data used the research is secondary data

This research result indicates that report of the management of assets and government of south sulawesi also concludes related income includes the cost of uncontrolled is the budget larger than, out and other income not budgeted but can be been implemented

Keywords : *Accounting Responsibility*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Kegunaan Penelitian.....	4
1.4.1 Kegunaan Teoritis	4
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Defenisi Akuntansi Pertanggungjawaban.....	6
2.1.1 Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban	7
2.1.2 Tujuan Akuntansi Pertanggungjawaban.....	8
2.1.3 Jenis Pelaporan Pertanggungjawaban.....	9
2.2. Pengertian Pusat Pertanggungjawaban.....	10
2.2.1 Jenis-jenis Pusat Pertanggungjawaban	11

2.3. Biaya	14
2.3.1 Klasifikasi Biaya	15
2.4. Biaya Standar.....	15
2.4.1 Pengertian Biaya Standar	15
2.4.2 Kegunaan Biaya Standar	16
2.4.3 Standar dan Variansi Bahan Baku.....	16
2.4.4 Standar dan Variansi Tenaga Kerja.....	17
2.4.5 Standar dan Variansi Biaya Overhead	18
2.5 Pengertian Pengendalian	19
2.5.1 Tujuan Pengendalian	20
2.6 Penelitian Terdahulu	20
2.7 Kerangka Empirik.....	21

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian.....	23
3.2 Kehadiran Peneliti.....	23
3.3 Lokasi Penelitian	23
3.4 Jenis dan Sumber Data	24
3.4.1 Jenis Data.....	24
3.4.2 Sumber Data	24
3.5 Teknik Pengumpulan Data	24
3.6 Analisis Data	25
3.7 Tahap-tahap Penelitian.....	26

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	28
4.1.1 Sejarah Singkat Biro Pengelolaan Aset dan Barang Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.....	28
4.1.2 Struktur Organisasi	29

4.2 Pembahasan	32
4.2.1 Analisis Varian.....	33
4.2.2 Akuntansi Pertanggungjawaban Biro Pengelolaan Aset dan Barang Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	34
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	36
5.2 Saran.....	36
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	37
DAFTAR PUSTAKA	38

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017 dan 2016.....	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1 Struktur Organisasi Biro Pengelolaan Aset dan Barang Daerah.....	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam suatu organisasi pada level *middle-up* akan sangat tidak mungkin sebagai manajer puncak untuk mengendalikan seluruh kegiatan operasi organisasinya secara perorangan. Untuk mengatasi hal itu diperlukan perangkat dan sistem yang dapat menjamin dan meyakinkan manajer puncak bahwa anggota organisasinya dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan keinginan manajer puncak. Manajer puncak tidak perlu lagi terlibat secara langsung dalam kegiatan operasi organisasi karena telah mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada para manajer pusat pertanggungjawaban untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan operasi organisasi. Definisi pusat pertanggungjawaban menurut mardiasmo (2009:46) "Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab terhadap aktifitas pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya"

Setiap pusat pertanggungjawaban dikepalai oleh seorang manajer pusat pertanggungjawaban yang mengendalikan unit tersebut, dan berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja manajer segmen/unit. Untuk tujuan ini, organisasi dibagi-bagi kedalam suatu jaringan pusat pertanggungjawaban secara individual atau unit-unit organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan suatu fungsi atau sekelompok fungsi yang saling berkaitan. Suatu organisasi besar seperti pemerintah daerah dapat dianggap sebagai suatu pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban tersebut dipecah-pecah lagi menjadi pusat pusat pertanggungjawaban yang lebih kecil hingga kepada

level pelayanan atau program, misalnya dinas-dinas dan sub-sub dinas. Pusat-pusat pertanggungjawaban tersebut biasanya disebut dengan istilah satuan kerja perangkat daerah (SKPD). SKPD kemudian menjadi dasar perencanaan dan pengendalian anggaran serta penilaian kinerja pada unit yang bersangkutan. Pusat pertanggungjawaban memperoleh sumber daya input berupa tenaga kerja, material dan sebagainya dan dengan input tersebut diharapkan dapat menghasilkan output dalam bentuk barang atau pelayanan pada tingkat kualitas dan kuantitas tertentu.

Pengendalian manajemen berfokus pada pusat pertanggungjawaban, karena pusat pertanggungjawaban merupakan alat untuk melaksanakan strategi. Tiap-tiap pusat pertanggungjawaban dibebani tugas untuk melaksanakan program atau aktivitas tertentu, kemudian melaporkan hasil pencapaian kegiatannya serta biaya-biaya yang mungkin timbul dari aktivitas tersebut. Program-program dari tiap-tiap pusat pertanggungjawaban pada level yang tinggi, sehingga pada akhirnya tujuan umum organisasi dapat tercapai.

Setiap pusat pertanggungjawaban mempunyai manajer yang bertanggung jawab atas kegiatan yang terjadi di dalam pusat yang di pimpinnya dan secara periodik manajer tersebut akan mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada pimpinan (Sriwidodo, 2010). Pelaksanaan pertanggungjawaban ini harus dilakukan secara objektif karena menjadi salah satu penentu kebijakan perusahaan dimasa depan. Pelaporan pertanggungjawaban juga berfungsi sebagai salah satu alat penilaian kinerja atau prestasi terhadap para manajer tingkat bawah. Penilaian prestasi kerja yang telah dilaksanakan adalah dengan membandingkan realisasi pelaksanaan dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelum adanya tolak ukur penilaian prestasi akan mendorong dan memotivasi para pelaksana pada pencapaian tujuan perusahaan (Muharam, 2011).

Berdasarkan dari uraian diatas, penerapan akuntansi pertanggungjawaban dirasakan penting dikarenakan mampu membantu manajemen pusat pertanggungjawaban dalam melakukan pengawasan terhadap pengendalian biaya. Penelitian mengenai hubungan antara penerapann akuntansi pertanggungjawaban dengan efektivitas pengendalian biaya telah dilakukan sebelumnya oleh Hutarabat (2009) dengan hasil yang menunjukan bahwa terdapat hubungan yang positif antara penerapan akuntansi pertanggungjawaban dengan efektivitas pengendalian biaya. Permasalahan yang muncul akan diteliti dalam tulisan ini menggunakan pendekatan observatif untuk melihat bagaimana penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada suatu perusahaan.

Dengan adanya akuntansi pertanggungjawaban, pimpinan dapat mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab ke tingkat pimpinan di bawahnya dengan lebih efisien tanpa memantau secara langsung seluruh kegiatan perusahaan. Akuntansi pertanggungjawaban juga perlu dievaluasi agar berlangsung dengan baik sehingga manajemen dapat dengan mudah menghubungkan biaya yang timbul dengan manajer pusat pertanggungjawaban yang bertanggung jawab. Penerapan akuntansi pertanggungjawaban yang memadai mampu mendorong perusahaan guna mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan uraian di atas dan melihat pentingnya pembagian tanggung jawab, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai, **“Akuntansi Pertanggung Jawaban Pada Biro Pengelolaan Aset Dan Barang Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah pokok dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan akuntansi pertanggung jawaban pada Biro Pengelolaan Aset dan Barang Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pelaksanaan akuntansi pertanggung jawaban pada Biro Pengelolaan Aset dan Barang Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Memberikan pengetahuan tambahan tentang perkembangan pemikiran terhadap akuntansi pertanggungjawaban.
- b. Hasil penelitian ini dapat menambahkann pengetahuan dan pemahaman mengenai penerapan akuntansi biaya khususnya pada akuntansi pertanggungjawaban.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagi peneliti
Penelitian ini bermanfaat untuk menerapkan pengetahuan yang di dapat selama perkuliahan.
- b. Bagi penelitian selanjutnya
Memberikan pengetahuan tambahan tentang perkembangan pemikiran terhadap penerapan akuntansi pertanggungjawaban.

c. Bagi perusahaan

Menjadi bahan kajian agar lebih memperhatikan akuntansi pertanggungjawaban terhadap pengendalian biaya standar, untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam persaingan bisnis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Defenisi Akuntansi Pertanggungjawaban

Akuntansi pertanggungjawaban di dasarkan pada pemikiran bahwa seorang manajer harus dibebani tanggung jawab atau kinerjanya sendiri dan kinerja bawahannya. Konsep akuntansi pertanggungjawaban menjadi pedoman departemen akuntansi untuk mengumpulkan, mengukur, dan melaporkan kinerja sesungguhnya, kinerja yang diharapkan dan selisih yang timbul dalam setiap pertanggungjawaban.

Menurut Mulyadi (2001) akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi, dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok orang yang bertanggung jawab atas penyimpanan biaya dan pendapatan yang di anggarkan. Definisi tersebut mengatakan bahwa akuntansi pertanggungjawaban mengelompokkan organisasi atas pusat-pusat pertanggungjawaban, sehingga apabila terjadi penyimpangan atas anggaran, maka pihak manajemen dapat mencari orang yang bertanggung jawab atas penyimpangan yang terjadi.

Akuntansi pertanggungjawaban bukan hanya untuk menunjukan terjadinya penyimpangan biaya yang diperlihatkan dalam laporan kinerja manajer, tetapi yang terutama adalah sebagai manfaat dengan memberi informasi bagaimana kegiatan yang menjadi tugas manajer pusat pertanggungjawaban dilakukan. Melalui informasi ini diharapkan akan timbul motivasi bagi manajer untuk bekerja lebih efektif dan efisien serta dapat

melakukan tindakan korektif yang diperlukan agar hasil yang diperoleh merupakan yang terbaik dengan tidak mengesampingkan tujuan perusahaan. Sementara menurut Hansen dan Mowen (2001) "Akuntansi Pertanggungjawaban adalah sebuah sistem yang disusun untuk mengukur hasil setiap pusat pertanggungjawaban dan membandingkan hasil-hasil tersebut dengan hasil yang diharapkan atau dianggarkan". Dapat disimpulkan bahwa akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk mengevaluasi kinerja pusat-pusat pertanggungjawaban dan memudahkan pengendalian atas hasil dan biaya yang menjadi tanggung jawab manajer yang bersangkutan.

2.1.1 Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban

Menurut Harahap (2001) syarat-syarat penerapan akuntansi pertanggungjawaban yang baik adalah:

- a. Memiliki struktur organisasi yang baik, struktur organisasi yang baik artinya memiliki batasan terhadap wewenang dan tanggung jawab yang tegas dan jelas sehingga setiap bagian dengan bagian lain tidak merasa bingung.
- b. Memberikan sistem bonus dan hukuman berdasarkan standar pertanggungjawaban yang ditetapkan.
- c. Memiliki sistem akuntansi yang sejalan dan disesuaikan dengan pusat pertanggungjawaban.
- d. Anggaran disusun menurut pusat-pusat pertanggungjawaban, anggaran harus disusun sesuai dengan tingkatan manajemen dalam organisasi yang diatur dalam sistem pertanggungjawaban.
- e. Terdapat sistem pelaporan pendapatan dan biaya dari manajer yang sesuai dengan tanggung jawabnya.

- f. Untuk akuntansi pertanggungjawaban biaya harus terdapat pemisahan antara biaya yang dapat dikendali (controllable) dengan yang tidak dapat oleh manajer pusat pertanggungjawaban yang bersangkutan.
- g. Harus ada akibat baik berupa penghargaan reward maupun penalty sebagai akibat prestasinya sesuai dengan ukuran tanggung jawabnya.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban yang baik harus memiliki syarat yang telah di tentukan. Jika salah satu syarat yang ada tersebut ada yang tidak terpenuhi maka sistem akuntansi pertanggungjawaban tersebut tidak sempurna sehingga harus ada perbaikan-perbaikan untuk menyempurnakannya.

2.1.2 Tujuan Akuntansi Pertanggungjawaban

Mulyadi (2001) menjelaskan bahwa salah satu tujuan diterapkan akuntansi pertanggungjawaban adalah untuk mengendalikan biaya, dengan cara menggolongkan, mencatat, meringkas dan menghubungkan langsung dengan pejabat atau orang yang bertanggung jawab atas terjadinya biaya yang dikendalikan olehnya. Tujuan lain diterapkannya akuntansi pertanggungjawaban adalah sebagai berikut:

- a. Dengan akuntansi pertanggungjawaban, pengelompokkan dan pelaporan biaya yang dilakukan untuk tiap tingkatan manajemen hanya dibebani dengan biaya-biaya yang berada dibawah pengendaliannya atau yang berada dibawah tanggung jawabnya. Dengan demikian biaya dapat dikendalikan dan diawasi secara efektif dan efisien.
- b. Untuk pengendalian biaya, karena selain biaya-biaya dan pendapatan diklasifikasikan menurut pusat pertanggung jawabannya, biaya dan pendapatan yang dilaporkan juga harus dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu sehingga akuntansi

pertanggungjawaban juga memungkinkan beroperasinya suatu sistem anggaran dengan baik.

- c. Membantu manajemen dalam pengendalian dengan melihat penyimpangan realisasi dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan.
- d. Dapat digunakan sebagai salah satu alat perencanaan untuk mengetahui kriteria-kriteria penilaian prestasi unit usaha tertentu.
- e. Dapat digunakan sebagai pedoman penting langkah yang harus di buat oleh perusahaan dalam rangka pencapaian sasaran perusahaan.
- f. Dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam rangka penilaian kinerja (performance) bagian-bagian yang jajda dalam perusahaan, karena secara berkala top manajemen menerima laporan pertanggungjawaban dari setiap tingkatan manajemen dan top manajer dapat menilai performance dari setiap bagian dilihat dari ditetapkan untuk jsetiap bagian yang menjadi tanggung jawabnya.

2.1.3 Jenis Pelaporan Pertanggungjawaban

Jika ditinjau dari sudut yang menggunakan informasi, maka peloparan informasi dapat dibagi atas dua jenis laporan, yaitu:

- a. Laporan ekstern, yaitu laporan-laporan yang ditunjukkan pada pihak luar perusahaan.
- b. Laporan intern, yaitu laporan-laporan untuk kepentingan manajemen intern dalam menjalankan atau melaksanakan kegiatan perusahaan.

Bila dilihat dari kedua hal yang sebelumnya, maka laporan pertanggungjawaban termasuk dalam laporan intern perusahaan dapat di kelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu:

1. Laporan perencanaan (planning report)
2. Laporan pengawasan (control report)

3. Laporan informasi (information report)

Dari ketiga laporan diatas, laporan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Laporan prestasi (performance report)
- b. Laporan informasi (information report)

Dalam hal ini laporan prestasi (performance report) merupakan suatu laporan yang menampilkan data dari pusat pertanggungjawaban yang membandingkan keadaan yang sebenarnya dengan anggaran yang telah dibuat sebelumnya, dibuat secara berkala dalam bentuk dan format yang tetap.

2.2 Pengertian Pusat Pertanggungjawaban

Pusat pertanggungjawaban ialah unit kerja dalam organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab. Suatu pusat pertanggungjawaban dapat dipandang sebagai suatu system yang mengolah masukan menjadi keluaran. Hansen (2002), Pusat pertanggungjawaban adalah suatu segmen bisnis yang manajemennya bertanggung jawab terhadap pengaturan kegiatan-kegiatan tertentu. Sedangkan pusat pertanggungjawaban menurut Anthony (2002), Pusat pertanggungjawab merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap pusat pertanggungjawaban dipimpin oleh seorang manajer yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas unit yang dipimpinnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi yang bersangkutan. Setiap pusat pertanggungjawaban membutuhkan masukan yang berupa sejumlah bahan baku, tenaga kerja ataupun jasa-jasa yang akan diproses dalam pusat

pertanggungjawaban. Hasil dari proses tersebut yaitu berupa keluaran yang terdiri dari produk atau jasa.

2.2.1 Jenis-jenis Pusat Pertanggungjawaban

Dalam organisasi perusahaan, penentuan daerah pertanggungjawaban dan manajer yang bertanggung jawab dilaksanakan dengan menetapkan pusat-pusat pertanggungjawaban dan tolak ukur kinerjanya. Suatu pusat pertanggungjawaban dapat dipandang sebagai suatu sistem yang mengolah masukan menjadi keluaran. Masukan suatu pusat pertanggungjawaban yang dinyatakan dalam satuan uang disebut dengan pendapatan.

Hubungan antara masukan dan keluaran suatu pusat pertanggungjawaban mempunyai karakteristik tertentu. Hampir semua masukan suatu pusat pertanggungjawaban dapat diukur secara kuantitatif, namun tidak semua keluaran pusat pertanggungjawaban dapat diukur secara kuantitatif.

Ada dua jenis pusat pertanggungjawaban, digolongkan menurut sifat input atau output moneter yang diukur untuk tujuan pengendalian (Anthony dan Govindarajan, 2009).

a. Pusat Pendapatan

Di pusat pendapatan, suatu output (yaitu, pendapatan) diukur secara moneter akan tetapi tidak ada upaya formal yang dilakukan untuk mengaitkan input (yaitu, beban atau biaya) dengan output. Pada umumnya, pusat pendapatan merupakan unit pemasaran/penjualan yang tak memiliki wewenang untuk menetapkan harga jual dan tidak bertanggung jawab atas harga pokok penjualan dari barang-barang yang mereka pasarkan. Penjualan atau pesanan aktual diukur terhadap anggaran dan kuota, dan manajer dianggap bertanggung jawab atas biaya yang terjadi secara langsung di dalam unitnya, akan tetapi ukuran utamanya adalah pendapatan.

b. Pusat biaya

Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang inputnya diukur secara moneter, namun outputnya tidak. Pusat biaya (cost center) manajer departemen atau divisi disertai tanggung jawab untuk mengendalikan biaya yang dikeluarkan otoritas untuk mengambil keputusan-keputusan yang mempengaruhi biaya tersebut. Pusat biaya merupakan jenis pusat pertanggungjawaban yang digunakan secara luas. Hal ini karena bidang-bidang dimana manajer mempunyai tanggung jawab dan otoritas atas biaya dapat diidentifikasi dengan cepat pada sebagian besar perusahaan. Besar atau kecilnya pusat biaya tergantung pada aktivitas-aktivitasnya.

Manajer pusat biaya perlu memastikan bahwa tugas-tugas yang dituntaskan dalam batasan yang diperkenankan oleh anggaran atau biaya standar. Manajer pusat biaya memakai biaya standar dan anggaran yang fleksibel untuk mengendalikan biaya. Apabila selisih dari standar yang signifikan, manajemen haruslah menginvestigasi aktivitas-aktivitas pusat biaya dalam upaya menentukan apakah biaya diluar kendali, atau sebaiknya standar biayanya yang memang perlu direvisi. Manajer pusat biaya tidak membuat keputusan menyangkut penjualan ataupun jumlah asset tetap yang diinvestasikan pada pusat biaya tersebut.

Kinerja pusat biaya terutama diukur berdasarkan efisiensi dan mutu. Kendatipun demikian, minimisasi biaya mungkin saja dilakukan dengan mengorbankan mutu dan volume produksi sehingga mengakibatkan tidak adanya keharmonisan dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Untuk menanggulangi tendensi ini perlu diterapkan jenis dan banyaknya produksi yang dikehendaki serta standar mutu yang diisyaratkan.

Terdapat dua cara beroperasinya pusat biaya. Beberapa pusat biaya diberikan sejumlah tetap sumber daya (anggaran) dan diminta menghasilkan

sebanyak mungkin keluaran dari sejumlah sumber daya tersebut. Pengelolaan pusat biaya yang lainnya adalah dengan meminimalkan biaya-biaya menghasilkan suatu kuantitas keluaran tertentu. Oleh karena itu, mutu produk yang diproduksi dalam pusat-pusat biaya harus dipantau.

Ada dua jenis umum dari pusat biaya, yaitu:

a) Pusat biaya teknik

Pusat biaya teknik memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Input-inputnya dapat diukur secara moneter.
2. Input-inputnya dapat diukur secara fisik.
3. Jumlah dolar optimum dan input yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit output dapat ditentukan.

b) Pusat biaya kebijakan

Pusat biaya kebijakan meliputi unit-unit administratif dan pendukung (seperti akuntansi, hukum, hubungan industrial, hubungan masyarakat, sumber daya manusia), operasi litbang, dan hampir semua aktivitas pemasaran. Output dari pusat biaya ini tidak bisa diukur secara moneter.

c) Pusat laba

Ketika kinerja finansial suatu pusat pertanggungjawaban diukur dalam ruang lingkup laba (yaitu, selisih antara pendapatan dan biaya), maka pusat ini disebut sebagai pusat laba (profit center). Laba merupakan ukuran kinerja yang berguna karena laba memungkinkan manajemen senior untuk dapat menggunakan satu indikator yang komprehensif, dibandingkan jika harus menggunakan beberapa indikator (beberapa di antaranya menunjuk ke arah yang berbeda).

Manajer pusat laba diukur kinerjanya dari selisih antara pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Oleh

karena itu dalam pusat laba, masukan maupun keluarannya diukur dalam satu rupiah untuk menghitung laba yang dipakai sebagai pengukur kinerja manajernya. Suatu pusat pertanggungjawaban merupakan pusat laba jika manajemen puncak menghendaki untuk mengukur keluaran pusat pertanggungjawaban tersebut diukur kinerjanya atas dasar selisih antara pendapatan dengan biayanya.

d) Pusat investasi

Di unit usaha yang lain, laba dibandingkan dengan aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Pusat pertanggungjawaban ini disebut sebagai pusat investasi. Ukuran prestasi manajer pusat investasi dapat berupa rasio antara laba dengan investasi yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut.

2.3 Biaya

Setelah salah satu data yang penting diperlukan oleh perusahaan adalah biaya. Biaya mengandung dua pengertian, yaitu dalam pengertian beban (expense) dan dalam pengertian biaya (cost). Biaya menurut Mulyadi (2009) dalam arti luas adalah: Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang memungkinkan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Adapun menurut Sunarto (2003) pengertian biaya dalam arti luas adalah Biaya merupakan harga pokok atau bagian yang telah dimanfaatkan atau dikonsumsi untuk memperoleh pendapatan. Sedangkan Bustamidan Nurlela (2009) dalam bukunya akuntansi biaya dan aplikasi menyatakan bahwa, Biaya (cost) adalah sumber ekonomis yang diukur dalam suatu uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Biaya ini belum habis masa pakainya, dan golongan sebagai aktiva yang dimasukkan kedalam neraca.

2.3.1 Klafikasi Biaya

Menurut Mulyadi (2009) terdapat berbagi biaya dalam suatu perusahaan, yaitu:

a. Biaya produksi

Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengelolah bahan baku menjadi produk yang siap utuk dijual. Biaya produksi dibagi menjadi tiga unsur yaitu bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead.

b. Biaya pemasaran

Biaya pemasaran merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk. Contohnya adalah biaya iklan, biaya angkutan dari gudang perusahaan ke gudang pembeli, gaji karyawan yang melaksanakan kegiatan pemasaran.

c. Biaya administrasi dan umum

Biaya administrasi dan umu merupakan biaya-biaya untuk mengkoordinasikan kegiatan produksi dan pemasaran produk. Contohnya adalah gaji karyawan bagian keuangan, akuntansi, personalia, biaya pemeriksaan akuntan, dan sewa kantor.

2.4 Biaya Standar

2.4.1 Pengertian Biaya Standar

Biaya standar menurut William dan Milton (2005) adalah biaya yang telah ditentukan sebelumnya untuk memproduksi satu unit atau jumlah tertentu produk selama suatu periode tertentu.

Biaya standar menurut Mulyadi (2009) : Biaya Standar adalah biaya yang ditentukan dimuka, yang merupakan jumlah biaya yang ditentukan sebelumnya

untuk memproduksi satu unit atau sejumlah tertentu produk selama satu periode tertentu.

2.4.2 Kegunaan Biaya Standar

Menurut William dan Milton (2005) biaya standar dapat digunakan untuk:

- 1) Menetapkan anggaran
- 2) Mengendalikan biaya dengan cara memotivasi karyawan dan mengukur efisiensi operasi.
- 3) Menyederhanakan prosedur perhitungan biaya dan mempercepat laporan biaya.
- 4) Membebaskan biaya persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi.
- 5) Menetapkan tawaran kontrak dan harga jual.

2.4.3 Standar dan Variansi Bahan Baku

Dua standar yang digunakan untuk bahan baku yaitu:

1. Harga standar bahan baku memungkinkan untuk
 - a) Memantau kinerja dari departemen pembelian dan mendeteksi pengaruh pada biaya bahan baku.
 - b) Mengukur dampak dari kenaikan atau penurunan harga bahan baku terhadap laba.

Menurut William dan Milton (2005), harga ditentukan di awal periode akuntansi dan digunakan selama periode tersebut. Selama perubahan harga yang cepat, perlu untuk mengubah harga standar secara berkala, terutama jika persediaan di catat di catatan akuntansi menggunakan harga standar. Jika varians harga dicatat ketika bahan baku dibeli, maka varian tersebut disebut

varian pembelian bahan baku. Jika dicatat kemudian, bahan baku dikeluarkan ke pabrik, maka varians disebut varians harga penggunaan bahan baku.

2. Standar kuantitas bahan baku atau penggunaan bahan baku.

Harga varians bahan baku dihitung dengan membandingkan kuantitas aktual dari bahan baku yang digunakan dengan kuantitas standar yang diperbolehkan. Kuantitas standar yang diperbolehkan adalah kuantitas bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit produk di kalikan dengan jumlah aktual dari unit yang di produksi selama periode tersebut.

2.4.4 Standar dan Variansi Tenaga Kerja

Menurut William dan Milton (2005) membagi biaya standar tenaga kerja menjadi dua, yaitu:

- 1) Standar tariff, upah, atau biaya. Standar tarif didasarkan pada perjanjian tawar-menawar yang menentukan upah per jam, tarif per unit, dan bonus. Tanpa adanya kontrak serikat kerja, maka standar tarif ditentukan oleh upah yang setuju. Karena tarif cenderung untuk didasarkan pada perjanjian yang pasti. Jika terjadi, biasanya varians tersebut disebabkan oleh kondisi jangka pendek yang tak biasa. Ketika suatu tarif direvisi atau suatu perubahan otorisasi secara temporer maka harus dilaporkan ke departemen penggajian.
- 2) Standar dan efisiensi, waktu dan penggunaan. Dihitung di akhir periode pelaporan dengan cara perbandingan jam aktual yang digunakan dengan jam standar yang di peroleh, keduanya diukur dengan tarif tenaga kerja standar. Jam standar yang diperbolehkan setara dengan jumlah standar dari jam tenaga kerja langsung untuk memproduksi satu unit produk dikali dengan jumlah aktual dari unit yang di produksi selama periode tersebut.

2.4.5 Standar dan Variansi Biaya Overhead

Menurut William dan Milton (2005) pertimbangan yang digunakan untuk menetapkan standar variansi overhead sebagai berikut:

- 1) Anggaran overhead pabrik dibuat dengan mengestimasi setiap pos dari overhead yang diperkirakan akan terjadi setiap departemen, pusat biaya atau aktivitas yang telah ditentukan. Kemudian anggaran biaya jasa dialokasikan ke departemen pengguna berdasarkan jumlah yang direncanakan.
- 2) Aktivitas yang dipilih harus secara akurat

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat empat unsur dalam biaya, yaitu:

1. Pengorbanan sumber ekonomis
2. Diukur dalam satuan uang
3. Telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi
4. Untuk mencapai tujuan tertentu

Selama ini banyak pihak mendefinisikan biaya sebagai beban, padahal pada kenyataannya antar biaya (*cost*), dan beban (*expense*) memiliki pengertian yang berbeda. Untuk lebih jelasnya dibawah ini akan dikemukakan pendapat mengenai pengertian beban (*expense*). Pengertian *expense* menurut Carte, William K, Milton, dan Usry (2006) adalah sebagai berikut *Expense* adalah aliran keluar terukur dari barang yang kemudian dibandingkan dengan pendapatan untuk mencantumkan laba, atau sebagai penurunan dalam aktiva bersih sebagai akibat kegunaan jasa ekonomi. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa antara biaya dan beban itu mempunyai pengertian yang berbeda.

Biaya adalah suatu pengorbanan atau pengeluaran sumber-sumber ekonomi dapat diukur dengan nilai uang untuk mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan beban adalah pengorbanan atau pengeluaran sumber-sumber ekonomi yang dapat diukur dengan nilai uang merealisasikan jumlah pendapatan pada suatu periode akuntansi. Beban merupakan bagian dari biaya yang sudah habis dan telah menghasilkan pendapatan. Pendapatan jadi perbedaann yang mendasar antara biaya dan beban terletak pada jangka waktu.

2.5 Pengertian Pengendalian

Manusia membutuhkan adanya suatu pengendalian dalam kehidupannya atas apa yang sedang dilakukan maupun yang telah dilakukannya. Adanya pengendalian juga dibutuhkan oleh suatu perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Daljono (2009) definisi pengendalian adalah, pendendalian (control) merupakan kegiatan manajemen setiap hari untuk meyakinkan bahwa aktivitas organisasi sesuai dengan yang telah direncanakan. Sedangkan Hansen dan Mowen (2009) mendefinisikan pengendalian sebagai berikut: Pengendalian adalah aktivitas manajerial untuk memonitor implementasi rencana dan melakukan perbaikan sesuai kebutuhan. Pengendalian biasanya dicapai dengan menggunakan umpan balik.

Menurut Mulyadi (2007) definisi pengendalian adalah usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui perilaku yang diharapkan. Menurut Usry dan Hammer (1994) bahwa pengendalian merupakan usaha sistematis perusahaan untuk mencapai tujuan dengan cara membandingkan prestasi kerja dengan rencana dan membuat tindakan yang tepat untuk mengoreksi perbedaan penting.

2.5.1 Tujuan Pengendali

Pengendalian bukan hanya untuk mencari kesalahan, tetapi berusaha untuk menghindari terjadinya kesalahan serta memperbaikinya jika terdapat kesalahan. Jadi pengendalian dilakukan sebelum proses, saat proses dan setelah proses yakni hingga hasil akhir diketahui. Dengan pengendalian diharapkan juga agar pemanfaatan semua unsur manajemen dilakukan secara efektif dan efisien.

Tujuan pengendalian merupakan sasaran yang ingin di capai dengan melaksanakan beberapa tindakan. Adapun tujuan pengendalian itu adalah (Hafid 2007)

- a. Untuk mengetahui dan menyelidiki pelaksanaan kegiatan yang sedang atau yang telah dijalankan, apakah sesuai dengan direncanakan.
- b. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan berjalan secara efisien serta mengetahui peningkatan efisiensi di masa yang akan datang
- c. Memperbaiki dan menilai tepat waktu atau tidaknya suatu keputusan yang diambil.

2.6 Penelitian Terdahulu

1. Martaulia Sitorus (2005)

Penelitian yang dilakukan oleh Martaulia Sitorus (2005) berjudul "Akuntnasi pertanggungjawaban sebagai alat pengawasan biaya pada PT. Buana Estale Cabang Medan". Variabel independen yang digunakan adalah akuntansi pertanggungjawaban, sedangkan variabel dependen adalah pengawasan biaya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akuntansi pertanggungjawaban telah digunakan sebagai dasar penilaian kinerja pada PT. Buana Estale Cabang Medan dan biaya yang dianggarkan dengan yang terealisasi telah diukur dengan baik.

2. Aria Weharia (2005)

Penelitian yang dilakukan oleh Aria Waheria (2005) berjudul “Manfaat akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat bantu bagi manajemen dalam menunjang efektifitas pengendalian biaya pemasaran (studi kasus pada PT. PLN Unit Distribusi Jabar dan Banten)”. Variabel independen yang digunakan adalah akuntansi pertanggungjawaban, sedangkan variabel dependen adalah efektivitas pengendalian biaya pemasaran. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemasaran telah digunakan secara efektif, yang terlihat dari target yang tercapai.

3. Sumarni Tarata (2009)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sumarni Tarata (2009) yang meneliti tentang penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian biaya pada PT. Haji Kalla Makassar, dengan variabel independen akuntansi pertanggungjawaban dan variabel dependen adalah pengendalian biaya, menemukan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban belum sepenuhnya efektif karena belum memisahkan biaya terkendali dan biaya tidak terkendali sehingga sulit mengukur kinerja manajer yang bersangkutan.

2.7 Kerangka Empirik

Akuntansi pertanggungjawaban merupakan faktor yang sangat penting dalam mengambil keputusan untuk menentukan langkah yang harus diambil manajer dalam memperbaiki prestasi kerja karyawan. Selain untuk memperbaiki prestasi kerja akuntansi pertanggungjawaban juga digunakan untuk pengambilan keputusan sesuai dengan laporan keuangan perusahaan.

Informasi dalam akuntansi pertanggungjawaban sangat penting untuk proses perencanaan dan pengendalian aktivitas organisasi, dengan informasi, manajer yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan realisasinya. Pengendalian diberikan kepada setiap manajer untuk merencanakan

pendapatan dan biaya sesuai dengan manajer yang bertanggung jawab (Athen, 2010).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan proses yang dilakukan secara bertahap, yakni dari perencanaan dan perancangan penelitian, menentukan fokus penelitian, pengumpulan data, analisis, dan penyajian hasil penelitian. Penulisan hasil penelitian ini dilakukan secara deskriptif atau melalui uraian-uraian yang menggambarkan dan menjelaskan subjek penelitian. Pendekatan dalam ini mengikuti langkah-langkah kerja penelitian kualitatif. Dalam hal ini disebut kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan adalah data kualitatif, yakni tidak menggunakan alat-alat pengukur. Metode kualitatif menghasilkan data deskriptif baik berupa kata-kata ungkapan tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2002).

3.2 Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti menjadi suatu keharusan karena peneliti sebagai instrumen kunci. Dalam penelitian ini peneliti merupakan perencana, pengumpul, dan penganalisa data. Peneliti harus terjun langsung untuk berpartisipasi dengan mendatangi lokasi penelitian yang telah ditetapkan sebagaimana dalam penelitian kualitatif untuk pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat Biro Pengelolaan Aset dan Barang Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Beralamat Jl. Urip Sumoharjo No. 7

Dengan pertimbangan bahwa selaian relevan dengan permasalahan yang diteliti, semoga juga mudah mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Data kuantitatif yaitu data berupa keterangan-keterangan tertulis yang bersumber dari perusahaan yang berada di Biro Pengelolaan Aset dan Barang Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

3.4.2 Sumber Data

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu, adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder yaitu data yang bersumber dan diperoleh berupa laporan-laporan dan informasi lain yang bersumber dari literatur dan informasi lain yang berhubungan dengan Biro Pengelolaan Aset dan Barang Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Sumber data sekunder berupa tabel atau bagan sederhana yang digunakan dalam penelitian untuk memberikan fakta-fakta yang lebih ringkas dan mudah di pahami oleh pembaca. Selain itu, digunakannya foto, grafik, dan peta, yakni merupakan usaha penulis untuk memberi keterangan yang lengkap dan detail tentang Biro Pengelolaan Aset dan Barang Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2016), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. **Penelian Lapangan**

Penelitian yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung pada Biro Pengelolaan Aset dan Barang Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta dengan mengadakan wawancara dengan bagian-bagian yang terkait dalam pembahasan ini.

b. **Tinjauan Pustaka**

Bentuk penelitian yang dilakukan dengan membaca literature-literature, karangan ilmiah serta sebagai pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan Biro Pengelolaan Aset dan Barang Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

3.6 Analisis Data

Menurut Ardhana (Lexy J. Moleong 2002: 103) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.

a) **Wawancara**

Wawancara merupakan re-checking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam

kehidupan sosial yang relative lama. Beberapa hal yang perlu dilakukan seorang peneliti saat mewawancarai responden adalah intonasi suara, kecepatan berbicara, sensitifitas pertanyaan, kontak mata, dan kepekaan nonverbal. Dalam mencari informasi peneliti melakukan dua jenis wawancara, yaitu auto anamnesa (wawancara yang dilakukan secara subjek atau responden).

Beberapa tips dalam melakukan wawancara adalah mulai dengan pertanyaan yang mudah mulai dengan informasi fakta, hindari pertanyaan multiple, jangan menanyakan pertanyaan pribadi sebelum building rapport, ulang kembali jawaban untuk klarifikasi, berikan kesan positif.

Selanjutnya wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur, dan dapat dilakukan dengan tatap muka maupun menggunakan telepon (Sugiyono, 2006; 138-140)

1) Wawancara Terstruktur

Pada wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila penelitian atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang dapat di peroleh. Dalam prakteknya selain membawa instrumen sebagai pedoman wawancara, maka pengumpulan data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur dan amerial lain yang dapat membantu dalam wawancara.

2) Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur maksudnya adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

3.7 Tahap-tahap Penelitian

Dalam setiap kegiatan penelitian pasti terdiri atas serangkaian tahap-tahap yang disusun sistematis yang menjurus yang terfokus pada temuan peneliti yang disertai dengan pembahasan secara ilmiah. Tahap-tahap penelitian akan mempermudah peneliti untuk melaksanakan penelitian membahas dan mengulas penelitian secara jelas. Penelitian ini akan dilakukan dengan tiga tahap kegiatan. Tahap-tahap penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Menentukan masalah penelitian, dalam tahapan ini peneliti mengadakan studi pendahuluan.
- b. Pengumpulan data, pada tahap ini peneliti mulai dengan menentukan sumber data, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dari segenap individu yang berkompeten dengan judul yang diangkat oleh peneliti. Pada tahap ini diakhiri dengan pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi wawancara dan dokumentasi.
- c. Analisis dan penyajian data, yaitu menganalisis data dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil penelitian

4.1.1. Sejarah Singkat Biro Pengelolaan Aset Dan Barang Pemerintah

Provinsi Sulawesi Selatan

Biro Pengelolaan Aset Searah Setda Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Biro Pengelolaan Barang Dan Aset Daerah Di mempunyai fungsi :

4. Penyiapan bahan, pengordinasian dan perumusan kebijakan daerah bidang perencanaan dan standarisasi, penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan penghapusan, dan pengamanan, pemeliharaan dan persediaan serta pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro Pengelolaan Barang Dan Aset Daerah
5. Penyiapan bahan dalam rangka pengordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah terkait bidang perencanaan dan standarisasi, penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, dan penghapusan, dan pengamanan pemeliharaan dan persediaan, serta pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro Pengelolaan Brang Dan Aset Daerah;
6. Penyiapan bahan, pengordinasian dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan dan standarisasi, penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan

pengamanan pemeliharaan dan persediaan, serta pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro Pengelolaan Barang Dan Aset Daerah.

7. Penyiapan bahan, pengorganisasian dalam rangka penyelenggaraan pelayanan administrative sesuai pembedangan tugas; dan

8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

4.1.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan kata kata Biro Pengelolaan Aset dan Barang Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan ditetapkan berdasarkan surat keputusan tanggal 28 maret 2015 tentang pengangkatan anggota dewan pengawasan dengan susunan sebabagai berikut;

1. Ketua merangkap anggota
2. Sekertaris merangkap anggota
3. Anggota

Gambar 4.1
STRUKTUR BIRO PENGELOLAAN BARANG DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN



Sumber : Biro Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2017

Berdasarkan struktur Organisasi, maka uraian tugas Biro Pengelolaan Aset dan Barang berdsasarkan surat keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. tentang tata kerja Biro Pengelolaan Aset dan Barang Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

1. Kepala Biro Pengelolaan Barang Dan Aset
 - a. Menetapkan perencanaan kerja dan pembagian tugas menurut bidang masing-masing untuk masa 12 bulan dan sesuai tahun buku perusahaan.
 - b. Member saran kepada daerah tentang anggaran tambahan atau perusahaananggaran yang terjadi dalam tahun buku yang diajukan direksi.

- c. Memelihara suasana kerja dalam seluruh organisasi dan berusaha mencapai tariff efesiensi dan administrasi yang baik
 - d. Secara berkala meninjau kembali dan menilai berbagai fungsi perusahaan daerah
2. Bagian Administrasi dan Umum
- a. Umum, keuangan, kepegawaian dan sekretaris
 - b. Mengkordinasiasian dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan pengelolaan serta perlengkapan
3. Bagian keuangan
- a. Membuat evaluasi dalam kegiatan perusahaan dibidang tugasnya
 - b. Melakukan pemeriksaan kas dan pembukuan perusahaan setiap hari

4.2. Pembahasan

Tabel 4.1
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017 Dan 2016

NO	URAIAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	(%)	REALISASI 2016
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN	804.600.000	404.567.080	50,28	1.651.734.008
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	804.600.000	404.567.080	50,28	1.651.734.008
	Pendapatan Pajak Daerah	0	0	0	0
	Pendapatan Retribusi Daerah	19.600.000	17.325.000	88,39	15.200.000
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan	0	0	0	0
	Lain-lain PAD yang SAH	785.000.000	387.242.080	49,33	1.636.534.008
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	804.600.000	404.567.080	50,28	1.651.734.008
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0	0	0	0
	Pendapatan Lainnya	0	0	0	0
	Jumlah Pendapatan lain-lain yang sah	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN	804.600.000	404.567.080	50,28	1.651.734.008
	BELANJA	19.002.169.253	17.318.498.822	91,04	12.630.620.993
	BELANJA OPERASI	15.912.031.253	14.481.683.522	91,01	10.580.489.593
	Belanja Pegawai	4.570.454.000	4.404.119	96,36	3.149.395.000
	Belanja Barang	11.341.577.253	10.077.564.522	88,85	7.431.103.593
	Jumlah Belanja Operasi	15.912.031.253	14.481.683.522	91,01	10.580.498.593
	BELANJA MODAL	3.110.138.000	2.836.815.300	91,21	2.050.122.400
	Belanja Tanah	0	0	0	294.297.500
	Belanja Peralatan dan Mesin	1.954.138.000	1.741.238.300	89,1	1.326.337.500
	Belanja Gedung dan Bangunan	756.000.000	698.077.000	92,33	349.878.400
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	79.609.000
	Belanja Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
	Belanja Aset Lainnya	400.000.000	397.500.000	99,37	0
	Jumlah Belanja Modal	3.110.138.000	2.836.815.300	91,21	2.050.122.400
	JUMLAH BELANJA	19.022.169.253	17.318.498.822	91,04	12.630.620.993
	SURPLUS/DEFISIT	(18.217.569.253)	(16.913.931.742)	92,84	(10.978.886.985)

Sumber : Biro Aset Berupa Laporan Keuangan

Berdasarkan table 4.1 laporan pertanggung jawaban diatas dapat dilihat adanya selisih anggaran yang disebabkan realisasi lebih kecil dari anggaran diatas sehingga terjadi selisish anggaran. Dimana anggaran yang ditetapkan lebih besar di banding belanja yang dilakukan.

4.2.1. Analisis Varians

1. Anggaran dan Realisasi

$$\begin{aligned} \text{Varians} &= \frac{\text{Anggaran} - \text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100\% \quad \text{atau} \\ \text{Rupiah} &= \text{Anggaran} - \text{Realisasi} \\ &= \text{Rp. 18.217.569.253} - \text{Rp. 16.931.74} \\ &= \text{Rp. 18.217.569.253} \end{aligned}$$

2. Varians Pendapatan

$$\text{Varians} = \frac{\text{Anggaran pendapatan} - \text{Realisasi pendapatan}}{\text{Anggaran pendapatan}} \times 100\%$$

Varians pendapatan – Pendapatan biaya

$$\begin{aligned} \text{Rupiah} &= \text{Rp. 804 600.000} - \text{Rp. 404.567.080} \\ &= \text{Rp. 804.600.000} \end{aligned}$$

3. Varians Belanja

$$\text{Varians} = \frac{\text{Anggaran Biaya} - \text{Realisasi Biaya}}{\text{Anggaran Biaya}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Rupiah} &= \text{Rp. 19.022.169.253} - \text{Rp. 17.318.498.832} \\ &= \text{Rp. 19.022.169.253} \end{aligned}$$

Berdasarkan analisis varians anggaran menunjukkan adanya selisih anggaran, dengan yang terealisasi pada tahun 2017 lebih besar daripada tahun 2016 baik itu pendapatan belanja anggaran, hal ini disebabkan karena jumlah yang dianggarkan terlalu besar dibandingkan tahun sebelumnya.

4.2.2. Akuntansi Pertanggungjawaban Biro Pengelolaan Aset dan Barang Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Akuntansi pertanggungjawaban menunjukkan sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa, sehingga pengumpulan dan laporan serta penghasilan dilakukan sesuai dengan bidang pertanggungjawaban dalam organisasi dengan tujuan agar dapat menunjuk orang atau pihak yang bertanggungjawab terhadap penyimpangan dari biaya yang diselenggarakan. Adanya akuntansi pertanggungjawaban anggaran, berarti akan membantu pihak manajemen memperoleh informasi mengenai pengguna anggaran sehingga penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dengan mudah dianalisis dan dievaluasi agar dapat diperbaiki untuk masa yang akan datang.

Biro Pengelolaan Aset dan Barang Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi pusat atas penggunaan anggaran daerah, maka pelaporan akuntansi pertanggungjawaban sepenuhnya dibuat oleh bendahara Perusahaan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan semua bukti-bukti pengeluaran anggaran.
2. Melakukan pemisahan anggaran menurut jenis anggaran.
3. Menghitung saldo anggaran.

Setelah bukti-bukti pengeluaran anggaran, pemisah anggaran serta menghitung saldo anggaran maka bendahara menyiapkan dokumen model bendahara yaitu difungsikan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban anggaran yang isinya mencakup besarnya anggaran, realisasi anggaran dan selisih anggaran

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap salah seorang kepala bagian menjelaskan bahwa maksud dan tujuan daripada laporan pertanggungjawaban adalah untuk memberikan informasi mengenai realisasi anggaran yang dikeluarkan dan sekaligus untuk mengukur prestasi yang dicapai

manajemen, dan laporan pertanggungjawaban dibuat setiap tahun dengan mencantumkan anggaran dan realisasi untuk mengetahui selisih anggaran yang terjadi.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil dan pembahasan penelitian ini, maka dapat ditarik disimpulkan sebagai berikut:

1. Laporan pertanggungjawaban Biro Pengelolaan Aset dan Barang Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat dari pendapatan yang merupakan biaya tidak terkendali, dengan adanya selisih yang terjadi karena anggaran lebih besar dari realisasinya.
2. Laporan pertanggungjawaban Biro Pengelolaan Aset dan Barang Pemerintah Sulawesi Selatan juga menyimpulkan terkait pendapatan yang termasuk biaya tidak terkendali terdapat selisih anggaran lebih besar dari realisasinya, serta pendapatan lainnya yang tidak dianggarkan namun dapat terealisasi.
3. Anggaran yang selama ini ditetapkan pada Biro Pengelolaan Aset dan Barang Pemerintah Sulawesi Selatan belum berjalan dengan baik dimana dapat dilihat dari pendapatan yang memiliki selisih biaya yang dianggarkan lebih besar dari biaya yang terealisasi.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya perusahaan lebih meningkatkan lagi kinerja pada penjualan maupun jasa sehingga pemenuhan terhadap anggaran-anggaran yang telah ditetapkan bisa terpenuhi atau tercapai dengan baik.

2. Sebaiknya Biro Pengelolaan Aset dan Barang Provinsi Sulawesi Selatan Irbih teliti lagi dalam rekrutmrn pegawai dan menempatkan pegawai sesuai dengan kapasitas atau bidang pendidikannya.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Biro Pengelolaan Aset dan Barang Provinsi Sulawesi Selatan dalam memperoleh hasil atau materi yang dibutuhkan penelitian ini tidaklah mudah, hal ini disebabkan adanya kendala-kendala yang dihadapi sehingga peneliti mempunyai banyak kekurangan dan keterbatasan. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Keterbatasan waktu yang dimiliki peneliti yang menyebabkan hasil penelitian ini kurang maksimal.
2. Pihak perusahaan tidak memberikan rincian anggaran dan realisasi sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan dalam program.
3. Keterbatasan dalam mengetahui istilah-istilah atau simbol-simbol yang digunakan dalam lingkup Biro Pengelolaan Aset dan Barang Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan pelayan dan melaksanakan kinerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony dan Govindajaran. 2009. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jilid 1. Jakarta : Salemba Empat.
- Bustami, Bastian dan Nurlela. 2009. *Akuntansi Biaya*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Carter, William K dan Usry, Mitton F. 2009. *Akuntansi Biaya II*. Edisi 14. Jakarta : Salemba Empat.
- Daljono. 2009. *Akuntansi Biaya, edisi 3*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hammer, Carter, dan Usry. *Akuntansi Biaya, Edisi 11*. Jakarta : Erlangga
- Hansen dan Mowen. 2001. *Akuntansi Manajemen*. Edisi Tujuh, Jakarta : Salemba Empat.
- Lexy J. Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : ANDI.
- Mulyadi. 2001. *Akuntansi Manajemen : Konsep, Manfaat dan Reakayasa*. Jakarta : Salemba Empat.
- Mulyadi. 2007. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sunarto. 2003. *Akuntansi Biaya, Edisi Revisi*. Yogyakarta : AMUS
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.